

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu dasar dari ilmu adalah pengulangan (*replication*) penelitian, yaitu pengulangan penyelidikan-penyelidikan yang sama pada waktu dan tempat yang berlainan. Pengulangan juga penting karena “sifat sementara” dari ilmu itu sendiri.¹

Penulisan skripsi dengan tema analisis kebijakan ekstensifikasi NPWP seperti yang dilakukan penulis saat ini memang bukan penelitian yang pertama. Tema sejenis yang ditemukan penulis berjudul Analisis Kebijakan Penerbitan NPWP Secara Jabatan Langsung oleh Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak telah dilakukan oleh Sidney Aulia pada tahun 2006 yang lalu.

Secara umum skripsi tersebut meneliti tentang sejauh mana kebijakan tersebut dapat meningkatkan wajib pajak potensial dan sekaligus juga menemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dirjen Pajak. Kebijakan tersebut adalah pemberian NPWP pada bulan 2005 lalu yang dikenal dengan program 10 Juta NPWP. Berbeda dengan program ekstensifikasi yang dicanangkan sesudah tahun 2005, program 10 juta NPWP merupakan pemberian NPWP secara sepihak langsung berdasarkan data yang diolah dan dimiliki sendiri oleh Ditjen Pajak. Sementara itu skripsi ini berusaha untuk menganalisis program ekstensifikasi setelah tahun 2005 secara lebih detail pada tingkat KPP selaku pelaksana teknis kebijakan Dirjen Pajak dimana program ekstensifikasi yang dilaksanakan sudah berbeda karena KPP diharapkan dapat mencari dan mengolah sendiri data-data Wajib Pajak yang layak untuk memiliki dan diberikan NPWP secara jabatan maupun atas permintaan sendiri.

Terkait dengan isi penelitian yang juga membahas tentang pemberian NPWP secara jabatan, ada perbedaan dan persamaan yang ditemukan penulis atas hasil penelitian sebelumnya. Gambaran yang lebih detail tentang letak perbedaan-perbedaan tersebut akan disajikan penulis dalam tabel berikut ini:

¹ Michael H. Walizer & Paul L. Wiener, *terj*, Arief Sadiman, *Metode dan Analisis Penelitian: Mencari Hubungan*. (Jakarta: Erlangga, 1993), 131.

Tabel II.1
Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Kriteria	Skripsi Terdahulu	Skripsi Ini
1	Judul	Analisis Kebijakan Penerbitan NPWP Secara Jabatan Langsung oleh Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak	Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pemberian NPWP Orang Pribadi pada KPP Tebet
2	Pendekatan	Kualitatif	Kualitatif
3	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui apakah kebijakan penerbitan NPWP secara jabatan langsung oleh Kantor Pusat Ditjen Pajak dapat meningkatkan Wajib Pajak potensial. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh DJP berkaitan dengan penerbitan NPWP secara jabatan tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program ekstensifikasi pemberian NPWP pada KPP Tebet. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ekstensifikasi WPOP pada KPP Tebet.
4	Penarikan Sample	Purposive/Judgmental	Purposive/Judgmental
5	Jenis Penelitian	Deskriptif	Deskriptif
6	Kesimpulan	<p>Kebijakan penerbitan NPWP secara jabatan langsung oleh Kantor Pusat Ditjen Pajak belum dapat meningkatkan WP potensial.</p> <p>Kendala-kendala yang ditemukan antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan akses data dan informasi oleh DJP. 2. Adanya unsur politis terkait pelaksanaan program. 3. Adanya oknum petugas pajak yang tidak disiplin atau menyalahgunakan jabatan. 4. Sistem manajemen SDM yang masih kurang baik. 5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. 6. Tidak optimalnya hasil implementasi program dikarenakan terdapat ketentuan di bidang perbankan yang tidak sinkron dengan ketentuan di atasnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja ekstensifikasi NPWP OP yang dilaksanakan belum dapat dikatakan efektif karena perolehan NPWP masih jauh dari perencanaan dan penerimaan pajak yang dihasilkan dari NPWP tersebut belum signifikan. Selain itu, potensi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum tergalikan pada wilayah kerja KPP Tebet masih cukup besar. 2. Kendala yang muncul berasal dari internal Seksi Ektensifikasi dan juga dari eksternal.

Sumber: Diolah penulis dari Skripsi Sidney Aulia yang berjudul Analisis Kebijakan Penerbitan NPWP Secara Jabatan Langsung oleh Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Penerimaan negara secara umum terbagi menjadi dua, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Negara Perpajakan (penerimaan negara dari pajak). Penerimaan Negara Perpajakan merupakan tanggung jawab dari Ditjen Pajak untuk dapat memenuhi quota yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan dan lain-lain.

Usaha intensifikasi perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak pada saat ini sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat memenuhi tuntutan target penerimaan pajak yang setiap tahun terus bertambah. Hal itu sejalan dengan yang diungkapkan oleh Hasan Rachmany seperti dikutip oleh penulis sebagai berikut:

"Intensifikasi pajak sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk memenuhi target penerimaan pajak yang setiap tahun terus bertambah. Kemudian tarif pajak di mana-mana cenderung menurun sehingga ekstensifikasi adalah satu-satunya jalan".⁷

Usaha ekstensifikasi pemberian NPWP seperti yang telah digencarkan sejak tahun 2005 merupakan salah satu upaya untuk menambah penerimaan pajak. Program kerja ekstensifikasi yang efektif akan memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan dan memiliki signifikansi yang memadai.

Program ekstensifikasi pada tahun 2005 dengan memberikan NPWP secara jabatan langsung oleh Ditjen Pajak belum dapat dikatakan efektif karena tidak menghasilkan WP yang potensial dalam menambah jumlah penerimaan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel II.1 di atas.

Program ekstensifikasi NPWP yang terus dijalankan setelah tahun 2005 seharusnya diiringi dengan evaluasi guna mengatasi kelemahan program yang telah dijalankan sebelumnya. Analisis terhadap pelaksanaan program dapat meliputi efektivitas program kerja yang selama ini dilaksanakan, besaran potensi program kerja yang masih dapat digali, maupun untuk kendala-kendala yang selama ini ditemukan dalam pelaksanaan program. Dari ketiga hal tersebut

⁷ Hasan Rachmany dalam artikel "Ekstensifikasi Harus Hati-hati". Harian Seputar Indonesia, 05 Maret 2007.

diharapkan analisis yang dihasilkan lebih menyeluruh dan tidak terbatas pada pencapaian target NPWP dan penerimaan pajaknya saja.

Efektif atau tidaknya sebuah program dapat dilihat dari beberapa indikator yang diantaranya adalah: taraf pencapaian sasaran/tujuan dan memiliki efek/pengaruh yang besar terhadap organisasi (signifikan). Untuk mencapai efektivitas yang dimaksud, sebuah organisasi juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya seperti: Kejelasan program kerja, struktur organisasi & SDM, serta Penghargaan dan Motivasi.

Tingkat pencapaian/realisasi atas target maupun tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan hal pertama yang menunjukkan sebuah program terlaksana secara efektif atau tidak. Semakin tinggi tingkat pencapaian maka semakin efektif pula program kerja yang telah dilaksanakan. Dalam hal pelaksanaan program ekstensifikasi NPWP di KPP Tebet, perencanaan/target yang dimaksud adalah target perolehan NPWP baru. Penelitian akan mengukur efektivitas program kerja yang dilaksanakan dengan membandingkan perolehan NPWP pada tahun 2008 dengan target untuk tahun 2008 menggunakan data kuantitatif.

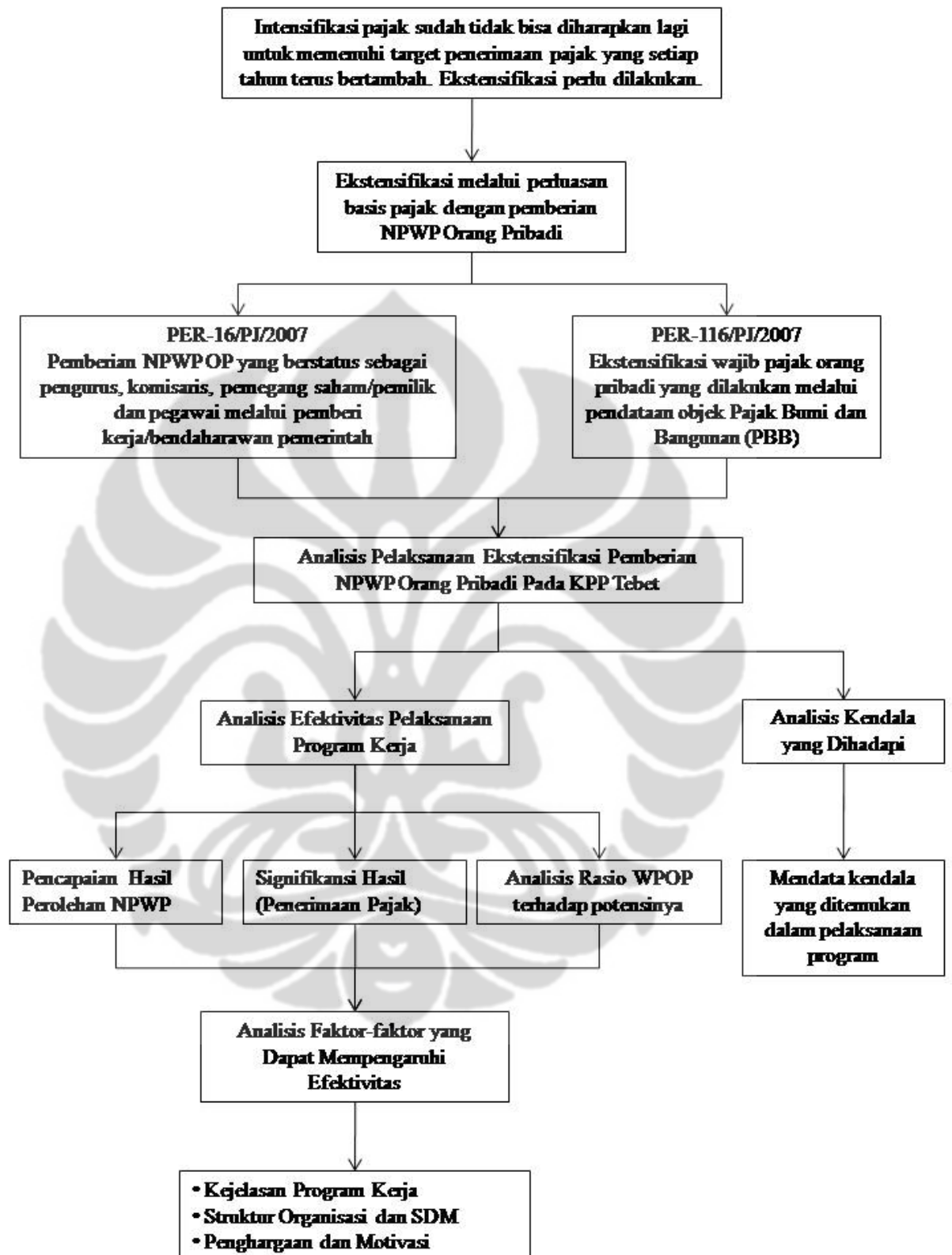
Efektif tidak hanya ditentukan dari pencapaian/realisasi atas targetnya tapi juga ditambah dengan seberapa besar hasil yang diperoleh dapat berpengaruh bagi organisasi. Hasil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak yang berasal dari perolehan NPWP baru, sedangkan pengaruhnya bagi organisasi dilihat dari seberapa besar jumlah penerimaan tersebut dan apakah merupakan sebuah penerimaan yang signifikan bagi KPP Tebet. Pencapaian perolehan NPWP yang sesuai dengan target atau bahkan melebihi target tidak akan berarti apa-apa sebelum hasil akhir yang diharapkan, yaitu berupa penerimaan pajak, ternyata minim atau bahkan tidak ada. Tujuan utama dari program ekstensifikasi adalah penerimaan pajak, jadi jika penerimaan pajaknya minim walaupun perolehan NPWP nya tinggi, belum dapat dikatakan program tersebut efektif. Program akan dapat dikatakan efektif jika perolehan NPWP sesuai dengan target dan menghasilkan penerimaan pajak baru yang signifikan bagi KPP Tebet.

Analisis perlu dilakukan juga terhadap potensi yang dimiliki oleh KPP Tebet dalam pelaksanaan program ini untuk mendapat gambaran target jangka panjang maupun untuk melihat prestasi perolehan saat ini apakah sudah dapat menyentuh seluruh potensi yang dimiliki atau belum. Untuk menganalisis potensi ini, penelitian akan menggunakan rumus rasio ekstensifikasi WP Orang Pribadi yang berasal dari Ditjen Pajak.

Kendala-kendala yang ditemukan di lapangan juga perlu diberikan pemecahan yang tepat agar tidak menjadi hambatan pelaksanaan di masa yang akan datang. Kendala-kendala bisa saja berasal dari internal maupun eksternal. Barangkali juga dapat ditemukan kendala yang sifatnya teknis, mental, ataupun kualitas SDM pelaksananya.

Pada akhirnya, jika semua hal-hal di atas telah dianalisis dengan baik, evaluasi pelaksanaan program ekstensifikasi yang menyeluruh akan dapat dihasilkan guna dijadikan modal dalam pelaksanaan program saat ini maupun di tahun-tahun yang akan datang. Jika program tersebut efektif tentu hasilnya akan langsung dirasakan oleh KPP Tebet. Sebaliknya, jika program tersebut ternyata belum efektif, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada faktor-faktor yang menghambatnya.

Program ekstensifikasi NPWP yang efektif tentu akan menghasilkan NPWP baru dan berakibat pula pada bertambahnya penerimaan pajak baru pada KPP Tebet. Semakin tinggi tingkat efektivitas pelaksanaan program, maka akan semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak di KPP Tebet. Gambaran yang lebih jelas tentang kerangka pemikiran pada Babi ini akan disajikan pada bagan berikut ini:



Bagan II.1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis (diolah)

B.1 Pengertian Efektivitas

Definisi tentang efektivitas umumnya berada pada penafsiran tentang keberdayagunaan atau taraf tercapainya sesuatu, baik itu sebuah program, peralatan, atau bahkan sebuah kebijakan. Penggunaan kata tersebut pada berbagai bidang tidak akan jauh berbeda kandungan maknanya seperti yang diungkapkan di atas, begitu juga dalam bidang sosial dalam penelitian ini. Untuk menemukan definisi efektivitas yang paling sesuai dalam penelitian ini akan disajikan pendapat-pendapat dari berbagai pihak pada uraian berikutnya.

Dalam sebuah organisasi, pengukuran terhadap efektivitas dapat dilakukan terhadap banyak nilai. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dikatakan menjadi ukuran baku untuk diberlakukan terhadap keseluruhan organisasi melainkan sifatnya sangat subjektif tergantung dari jenis organisasi yang akan diukur. Contoh nilai-nilai tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel II.2
Kriteria Tentang Keefektivan Organisasi

1. Keefektivan Keseluruhan	16. Perencanaan dan penetapan tujuan
2. Produktivitas	17. Konsensus tentang tujuan
3. Efisiensi	18. Internalisasi tujuan organisasi
4. Laba	19. Keterampilan interpersonal manajerial
5. Kualitas	20. Keterampilan manajerial
6. Kecelakaan	21. Manajemen informasi dan komunikasi
7. Pertumbuhan	22. Kesiapan
8. Kemangkiran	23. Pemanfaatan lingkungan
9. Pergantian pegawai	24. Evaluasi pihak luar
10. Kepuasan Kerja	25. Stabilitas
11. Motivasi	26. Nilai sumber daya manusia
12. Moral/semangat juang	27. Partisipasi dan pengaruh yang digunakan bersama
13. Kontrol	28. Penekanan pada pelatihan dan pengembangan
14. Konflik/solidaritas	29. Penekanan pada performa.
15. Fleksibilitas/penyesuaian	

Sumber: Stephen P Robbins. *Teori dan Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi Edisi 3*. (Jakarta: Arcan, 1994), hal.55

Tidak dapat disangkal, bahwa sebagian dari alasan panjangnya tabel tersebut adalah karena keanekaragaman organisasi yang sedang dievaluasi. Selain itu, tabel tersebut juga mencerminkan minat para penilai yang berbeda-beda.

Namun, semua kriteria tersebut tidak semuanya relevan bagi semua organisasi, dan pasti beberapa diantaranya lebih penting dibandingkan yang lain. Peneliti yang mentabulasi semua kriteria tersebut menyimpulkan bahwa karena sebuah organisasi dapat dikatakan efektif atau tidak berdasarkan beberapa faset yang berbeda yang secara relatif tidak bergantung satu sama lain, maka keefektifan organisasi tidak mempunyai "definisi yang operasional".⁸

Seperti yang diungkapkan dalam salah satu buku terbitan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Departemen Sosial RI, definisi efektivitas yaitu taraf sampai sejauh mana tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan mempunyai efek atau pengaruh yang besar.⁹ Dalam buku yang sama, efektivitas juga diartikan sebagai kemampuan dari suatu lembaga atau program dalam menunjukkan pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan dan pencapaian tujuan kegiatan.¹⁰

Pendapat lain mengaitkan efektivitas dengan proses evaluasi, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk mengukur ketepatan program, untuk mengidentifikasi cara-cara peningkatan pelayanan atau untuk memenuhi permintaan dari kelompok penyandang dana.¹¹ Sementara itu pengukuran efektivitas terhadap sebuah tim kerja dapat dilakukan terhadap faktor-faktor berikut:

- Kejelasan Sasaran dan Tujuan
- Pencapaian Hasil
- Struktur
- Keterampilan Memecahkan Masalah
- Dukungan Atasan
- Pemanfaatan Sumber Daya Tim
- Penghargaan dan Motivasi
- Manajemen Konflik
- Pemahaman Peran
- Efektivitas Komunikasi
- Kreativitas¹²

⁸ Stephen P Robbins. Teori dan Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi Edisi 3. (Jakarta: Arcan, 1994), hal.55

⁹ Sunarno Handyaningrat dalam Balitbang Kesejahteraan Sosial RI yg berjudul Kajian Efektivitas Loka Bina Karya dalam Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial. 1996. Jakarta. Hal.5

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Gloria E. Badef. Mengukur Prestasi Tim (Terjemahan). CV Teruna Grafica. Jakarta:1999 hal. 7

Efektivitas pajak (*tax effectiveness*) mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi dari pajak tersebut. Efektivitas atau hasil guna pajak merupakan perbandingan antara hasil pemungutan (realisasi) dengan potensi pajak itu sendiri. Dengan demikian efektivitas pajak adalah realisasi penerimaan pajak berbanding dengan potensi penerimaan pajak (pencapaian hasil).¹³

Menurut Mansury, dijelaskan bahwa salah satu dasar atau kunci dari terselenggaranya administrasi perpajakan yang efisien dan efektif adalah adanya informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, disamping dasar lainnya antara lain kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang, reformasi, dalam bidang perpajakan yang mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan.¹⁴

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa untuk mengukur efektivitas dapat ditentukan dari indikator-indikator yang dianggap paling penting dan merepresentasikan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam skripsi ini yang dimaksud dengan efektivitas adalah kemampuan dari suatu lembaga atau program dalam menunjukkan pelaksanaan/realisasi program kerja yang sesuai dengan perencanaan dan pencapaian tujuan serta mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap organisasi.

B.2 Nomor Pokok Wajib Pajak

Sasaran program ekstensifikasi terhadap orang pribadi adalah pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan yang dengan bertambahnya NPWP maka diharapkan memberikan peningkatan atas penerimaan pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Sebelum memenuhi kewajiban dalam perpajakan Wajib Pajak harus sudah memiliki NPWP.¹⁵

¹³ Devas dalam Tesis R Billy Djunaedih Djajaprana yang berjudul Peran Koordinasi Ekstensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan PPh 21 di Provinsi DKI Jakarta. 2004. hal.9

¹⁴ *Ibid.* hal.10

¹⁵ Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset, 1999. Hal. 17

Dari pengertian tersebut maka dapat terlihat bahwa fungsi dari NPWP antara lain adalah:

1. Sebagai identitas wajib pajak.
2. Untuk dipergunakan dalam penyelesaian kewajiban administrasi perpajakan.

NPWP hanyalah salah satu bagian kecil dari administrasi perpajakan. Administrasi pajak dalam arti luas adalah seperti yang diungkapkan oleh Rosdiana sebagai berikut:

Administrasi pajak dalam arti luas bisa meliputi fungsi, sistem, dan organisasi/kelembagaan. Sebagai suatu sistem, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *laws enforcement*, tetapi lebih penting dari itu, sebagai *Service Point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. Pelayanan seharusnya tidak boleh lagi dilakukan 'ala kadar'nya karena akan membentuk citra yang kurang baik, yang pada akhirnya akan merugikan pemerintah jika *image* tersebut ternyata membentuk sikap 'taxphobia'.¹⁶

B.3 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak tidak lain ditujukan untuk menambah penerimaan negara, yaitu sebuah metode yang secara umum identik dengan perluasan cakupan pengenaan pajak dengan menambah sumber-sumber penerimaannya.

Menurut Soemitro, definisi ekstensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

Ekstensifikasi pajak adalah cara meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah Wajib Pajak baru dan menciptakan pajak-pajak yang baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.¹⁷

Dari pengertian tersebut, ekstensifikasi pajak diperluas pengertiannya dengan memiliki tiga cara dalam penerapannya, yaitu menambah Wajib Pajak, menciptakan pajak-pajak yang baru, atau memperluas lingkup pajak yang sudah ada.

¹⁶ Haula Rosdiana. *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005. Hal. 98

¹⁷ Rochmat Soemitro (penulis buku *Pajak dan Pembangunan*) dalam skripsi Aditya Ramadona dengan judul *Analisis Ekstensifikasi Perpajakan atas Apartmen Sebagai Suatu Objek Pajak Hotel: Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta*. Fisip UI:2006 hal.7

Definisi yang senada juga diungkapkan oleh Hardi tentang ekstensifikasi pajak yaitu sebagai upaya mencari wajib pajak yang bersembunyi.¹⁸ Sementara itu, Liberti Pandiangan, Kepala KPP Madya Palembang, memberikan pemahaman yang agak berbeda tentang ekstensifikasi pajak yaitu sebagai upaya untuk menerapkan *equal treatment* (perlakuan yang sama dalam perpajakan) bagi masyarakat oleh karena prinsip dasar perpajakan yang tidak membolehkan adanya diskriminasi.¹⁹

Dengan demikian, dari beberapa definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan secara umum tentang pengertian ekstensifikasi pajak yang dalam hal ini dikhususkan pada ekstensifikasi NPWP yaitu sebuah metode atau cara untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperluas cakupan pemungutannya dalam arti menambah wajib pajak baru, baik yang memang belum terdaftar atau yang sengaja bersembunyi, sehingga tercapai perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara dalam bidang perpajakan.

Usaha ekstensifikasi yang dilaksanakan tidak lain bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan negara. Se jauh mana program tersebut memberikan pengaruh atau seberapa signifikan hasilnya terhadap penerimaan negara setidaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam klasifikasi tingkat penerimaan. Tentunya program yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan tingkat penerimaan yang tinggi. Namun tidak menutup kemungkinan hasilnya akan hanya sebatas terklasifikasi pada tingkat penerimaan yang sedang atau bahkan rendah.

Selain hal tersebut, pada kenyataannya tidak semua usaha yang dilakukan dengan tujuan tertentu mendapatkan hasil sesuai yang direncanakan. Oleh karena itu, pengukuran terhadap efektivitas sebuah program menjadi keharusan sebagai salah satu evaluasi kinerja. Pertanyaan tentang sejauh mana tingkat efektivitas program yang dilaksanakan harus dapat dijawab dengan kondisi objektif yang terjadi. Jawabannya dapat berupa bahwa program tersebut memang efektif, atau cukup efektif, mungkin kurang efektif, dan bahkan tidak efektif sama sekali.

¹⁸ Hardi (penulis buku *Pemeriksaan Pajak*) dalam skripsi Astri Hapsari dengan judul *Analisis Upaya Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pedagang Eceran di KPP Jakarta Kebayoran Dua*. Fisip UI:2006 hal.28

¹⁹ Liberti Pandiangan, "Ekstensifikasi dan *Equal Treatment* Pajak" harian Bisnis Indonesia 12 Maret 2007 hal. 14

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengertian pendekatan kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Creswell adalah sebagai berikut:

”In qualitative methods (approaches) the human and social sciences offer several traditions. These tradition may be method types of data collection, analysis, and reporting writing, or overall designs that include all phases in the research process”²⁰

Dari pendapat tersebut, pendekatan penelitian kualitatif dalam ilmu sosial pada umumnya akan memiliki jenis-jenis aktivitas tertentu yang dilakukan dalam proses penelitian yang dapat berupa metode pengumpulan data, analisis data, ataupun pelaporannya.

Lebih detail lagi tentang definisi pendekatan kualitatif menurut Judith Preissle adalah:

Qualitative research is a loosely defined category of research designs or models, all of which elicit verbal, visual, tactile, olfactory, and gustatory data in the form of descriptive narratives like field notes, recordings, or other transcriptions from audio- and videotapes and other written records and pictures or films.²¹

Pendekatan kualitatif adalah sebuah rancangan penelitian yang dapat menggambarkan dengan lebih bebas, perolehan data baik itu berupa lisan, visual, yang dapat dirasakan, dalam bentuk deskriptif naratif seperti catatan lapangan, hasil rekaman, atau bentuk-bentuk rekaman audio video lainnya dan catatan-catatan tertulis, gambar serta film.

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²²

²⁰ John. W. Creswell, *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*, 1994; SAGE Publications; hal.11

²¹ Judith Preissle, <http://qualitativresearch.ratcliffs.net/>.

²² Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 6

Pendekatan ini dipilih mengingat penelitian akan difokuskan pada identifikasi bagaimana proses yang selama ini terjadi pada KPP Tebet dan sekaligus mencoba untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ekstensifikasi. Dari hasil analisis temuan-temuan itulah nantinya akan ditemukan sebuah penjelasan atas efektivitas program ekstensifikasi yang telah dijalankan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial. Tujuan penelitian deskriptif adalah menyajikan gambaran yang lengkap mengenai setting sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi yang jelas mengenai subyek penelitiannya. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan menjadi lebih akurat dibandingkan dengan penelitian eksplorasi.

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis akan berusaha menjelaskan efektivitas program ekstensifikasi yang telah dilaksanakan dengan membandingkannya dengan target penerimaan serta usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KPP Tebet.

3. Metode dan Strategi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari buku-buku, artikel, majalah, ataupun peraturan/keputusan Ditjen Pajak yang terkait dengan teori ataupun pembahasan tentang ekstensifikasi. Dari hasil studi kepustakaan tersebut akan diperoleh data sekunder yang memberikan pemahaman terhadap penulis dan dijadikan acuan dasar pertanyaan sekaligus sebagai pembanding untuk menganalisis efektivitas ekstensifikasi NPWP pada KPP Tebet.

b. **Pengumpulan Data di Lapangan**

Pengumpulan data di lapangan dilakukan untuk mendapatkan data terkait dengan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Tebet dalam usahanya untuk mengimplementasi kebijakan Ditjen Pajak dalam program ekstensifikasi NPWP. Penulis juga bermaksud untuk mendapatkan data tentang kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut dan yang terpenting adalah data pemasukan pajak yang berasal dari NPWP baru hasil ekstensifikasi. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, peneliti akan mendapatkannya dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan para pemegang informasi utama.

4. Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja merupakan dugaan sementara peneliti yang menjadi dasar dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Dalam hal permasalahan efektivitas program ekstensifikasi yang dijalankan oleh KPP Tebet, peneliti menduga belum tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi terhadap program yang selama ini dikerjakan untuk pada akhirnya bisa memberikan dampak pada penerimaan pajak yang signifikan.

Ukuran tercapainya tujuan program ekstensifikasi sepertinya lebih berorientasi terhadap penambahan jumlah NPWP sebanyak mungkin dengan kurang menyeleksi kapabilitas pihak-pihak yang akan diberikan NPWP. Sehingga pada akhirnya banyak NPWP yang sudah diberikan namun tidak secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakan seperti yang diharapkan.

5. Narasumber/informan

Untuk mendapatkan data dan informasi guna analisis dalam penelitian ini, informan yang akan ditemui oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan.
2. Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet.
3. Staf Pusat Data dan Informasi (PDI) KPP Tebet.
4. Empat orang Petugas Pelaksana Ekstensifikasi KPP Tebet.
5. Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak (akademisi).

6. Site Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan dua buah *site*. *Site* pertama adalah Kanwil DJP Jakarta Selatan, dalam hal ini Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi dan Penilaian sebagai organisasi diatas KPP Tebet yang melakukan pengawasan dan bimbingan atas berjalannya program ekstensifikasi pada KPP Tebet dan KPP lain dibawahnya.

Site yang kedua adalah KPP Tebet yang dalam hal ini adalah Seksi Pusat Data dan Informasi (PDI) dan Seksi Ekstensifikasi selaku pelaksana teknis program ekstensifikasi pada tingkat KPP. Dari Seksi ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang lebih bersifat teknis atas pelaksanaan program ekstensifikasi, baik itu cara-cara yang digunakan selama ini maupun kendala-kendala yang dihadapi.

7. Batasan Penelitian

Penelitian akan dilakukan terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan November tahun 2008 untuk program ekstensifikasi NPWP yang dijalankan pada periode Januari-Desember 2007 dan Januari-Oktober 2008. Penelitian akan difokuskan pada efektivitas program kerja yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan penambahan NPWP OP baru pada KPP Tebet dan tambahan penerimaan pajak dari NPWP baru hasil ekstensifikasi.